

ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA

Lina Pusvisasari¹, Nazwa Nurmaulida², Rama Prameswara Darma Putra³, Ridwan Fauzi⁴,
Siti Rabiah Haldawia Rahmani⁵

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyyah, STAI AL-Azhary Cianjur

Email: nenglinapusvisa@gmail.com¹ nazwanurmaulida244@gmail.com²
ramaprameswara28@gmail.com³ ridwanf057@gmail.com⁴ rabiahhaldawia@gmail.com⁵

Abstrak

Islam di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda mengalami dinamika yang kompleks, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Kehadiran kolonial Belanda tidak hanya membawa sistem pemerintahan baru, tetapi juga memengaruhi kehidupan umat Islam melalui kebijakan-kebijakan yang membatasi peran Islam dalam ruang publik. Meski demikian, Islam tetap berkembang dan berperan penting dalam membentuk identitas serta perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi dan peran Islam di Indonesia selama masa kolonial Belanda, khususnya dalam menghadapi tekanan politik dan budaya kolonial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku sejarah, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kultural yang mampu menjaga solidaritas umat serta mendorong semangat perlawanan terhadap penjajahan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, peran ulama, serta organisasi-organisasi Islam menjadi sarana penting dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dengan demikian, Islam memiliki kontribusi besar dalam menjaga identitas masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu faktor penting dalam proses menuju kemerdekaan.

Kata Kunci: Islam Indonesia, kolonial Belanda

Abstract

Islam in Indonesia during the Dutch colonial period experienced complex dynamics in social, political, educational, and religious aspects. The presence of Dutch colonial rule not only introduced a new system of governance but also influenced Muslim life through policies that restricted the role of Islam in the public sphere. Nevertheless, Islam continued to develop and played an important role in shaping identity and resistance among Indonesian society against colonialism. This study aims to examine the condition and role of Islam in Indonesia during the Dutch colonial era, particularly in responding to political and cultural pressures imposed by colonial authorities. The research employs a qualitative approach through library research by examining various literary sources, including

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 645

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

history books, academic journals, and relevant articles. The findings indicate that Islam functioned not only as a religious teaching but also as a social and cultural force that maintained Muslim solidarity and encouraged resistance to colonial domination. Islamic educational institutions such as pesantren, the role of ulama, and Islamic organizations became important means of preserving Islamic and national values. Thus, Islam made a significant contribution to maintaining Indonesian identity and became one of the important factors in the process toward independence.

Keywords: *Islam in Indonesia, Dutch Colonialism*

1. PENDAHULUAN

Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebagai agama mayoritas, Islam tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga membentuk struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat Nusantara. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Indonesia, keberadaan Islam menghadapi tantangan sekaligus mengalami dinamika yang kompleks.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Islam dipandang sebagai kekuatan sosial yang berpotensi mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menerapkan berbagai kebijakan untuk mengontrol aktivitas keagamaan umat Islam, baik melalui pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam, pembatasan peran ulama, maupun regulasi ibadah haji. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada praktik keagamaan, tetapi juga memengaruhi pola hubungan antara umat Islam dan pemerintah kolonial.

Di sisi lain, Islam justru menjadi sumber inspirasi bagi perlawanan dan gerakan sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai keislaman mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menentang ketidakadilan dan penindasan kolonial. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai gerakan Islam yang berperan dalam membangun identitas, solidaritas, serta semangat perjuangan bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai Islam di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda menjadi penting untuk memahami bagaimana agama berinteraksi dengan kekuasaan kolonial serta perannya dalam membentuk dinamika sosial dan politik masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi Islam dalam menghadapi dominasi kolonial Belanda di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam kondisi dan perkembangan Islam di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah makna kebijakan kolonial serta respons umat Islam dalam konteks sosial dan keagamaan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, arsip, dan artikel ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menafsirkan hubungan antara kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan dinamika kehidupan umat Islam pada masa tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Muhammadiyah dan NU

Kehadiran kolonialisme Belanda di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap sistem kehidupan sosial-keagamaan umat Islam, termasuk dalam tatanan perdagangan dan politik. Salah satu contohnya adalah penerapan cultuurstelsel (tanam paksa) pada 1830-1870, yang merupakan bentuk perbudakan dan menghancurkan mentalitas serta ekonomi bangsa Indonesia.

Selain itu, Belanda juga mengekang kehidupan beragama umat Islam melalui berbagai kebijakan kolonial. Pada 1882, Belanda membentuk lembaga khusus bernama Priesterraden, yang bertugas mengawasi aktivitas keagamaan umat Islam. Dari lembaga ini lahir peraturan pada 1905 yang mengharuskan setiap pengajar agama Islam untuk memperoleh izin dari pihak kolonial sebelum mengajar. Pada 1925, peraturan tersebut diperketat, sehingga tidak semua guru agama Islam diperbolehkan mengajar tanpa izin atau rekomendasi dari Belanda. Akumulasi ketidakpuasan Belanda terhadap gerakan Islam juga mendorong penutupan madrasah atau sekolah Islam yang tidak memiliki izin atau memberikan materi yang tidak disukai pihak kolonial, yang kemudian disebut Wilde School Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar).

Meskipun mengalami tekanan, semangat umat Islam untuk tetap mengembangkan pendidikan dan pengajaran Islam justru semakin meningkat. Madrasah dan pondok pesantren menjadi pusat pendidikan utama bagi anak-anak Muslim, menguatkan tesis Wertheim bahwa kebijakan penguasa non-Islam terhadap umat Islam sering kali menghasilkan efek yang berbeda dari tujuan awal penguasa. Kebangkitan ini ditandai dengan kepulauan tokoh-tokoh Indonesia yang menimba ilmu di Mekkah, seperti H. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) yang mengajar di Jembatan Besi Padang Panjang, KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) di Kauman Yogyakarta, KH. Adnan di Solo, dan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dan salah satu pendiri NU. Pergerakan ini juga dipengaruhi oleh pembaharuan di dunia Islam, misalnya dari Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Pemikiran Muhammad Abduh, misalnya, mulai disebarkan melalui majalah al-Imam oleh Syekh Thahir Jalaludin (1906) dan menginspirasi H. Abdullah Ahmad menerbitkan majalah al-Munir di Padang (1911).

Pada awalnya, perkembangan pemikiran Islam bersifat komunal, menggunakan solidaritas pedesaan (solidaritas mekanis dalam istilah sosiologi Durkheim). Namun, ketika isu nasionalisme muncul melalui Budi Utomo (1908), kebangkitan komunal mulai beralih ke pola asosiatif, ditandai dengan berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) yang berorientasi pada aspek ekonomi, politik, dan agama, serta menghimpun kekuatan masyarakat bawah.

Muhammadiyah lahir dengan orientasi murni keagamaan, fokus pada gerakan puritan untuk membersihkan Islam dari praktik yang dianggap simbolis, seperti haul, manaqib, dan berzanji. Kehadiran Muhammadiyah mengubah struktur sosial, mengurangi ikatan paternalisme santri-kyai, serta menggeser otoritas pesantren. KH. Ahmad Dahlan mengemukakan beberapa alasan mendirikan Muhammadiyah:

1. Sebagian umat Islam tidak teguh menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga takhayul dan syirik marak, dan amalan mereka mencampur tradisi agama Hindu, Buddha, dan Islam.
2. Lembaga pendidikan Islam saat itu dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.
3. Kemiskinan melanda rakyat, terutama petani dan buruh, sementara kaum Muslim kaya jarang menunaikan zakat sehingga hak orang miskin terabaikan.

4. Sebagian umat Islam hidup dalam fanatisme sempit, bertaklid buta, berpikir dogmatis, dan kehidupannya konservatif, formal, serta tradisional.

Jika Muhammadiyah berfokus pada aspek keagamaan, SI bergerak di level ekonomi dan politik. Di tengah kedua pola gerakan ini, lahirlah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai antitesa dari orientasi SI dan Muhammadiyah. Menurut Kontowijoyo, lahirnya NU dimotivasi oleh:

1. Ketidakpuasan NU terhadap politisasi agama yang dilakukan SI.
2. Reaksi terhadap gerakan pembaharuan Muhammadiyah yang anti-paternalisme dan non-mazhab.

Hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda Era Kolonialisme

Melihat fakta-fakta sejarah, hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda tentu tidak harmonis, meskipun sebagian dari kaum bangsawan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Aneka perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Aceh (1873-1903) sudah dapat membuktikan bahwa kedua bangsa tersebut pernah berselisih. Hal ini terjadi karena Bangsa Belanda datang untuk menjajah dan menguras kekayaan Nusantara.

Sejak awal Bangsa Barat datang untuk mencari dan menguasai sumber rempah-rempah Hal ini tentu mengganggu stabilitas bangsa Melayu sebagai pedagang. Apalagi Bangsa Belanda datang untuk memonopoli perdagangan melalui VOC. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh bangsa pribumi.

Selain itu, Belanda terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan, meskipun di sisi lain pemerintah Kolonial Belanda memberikan kebebasan tentang hal keagamaan. Kolonial Belanda menganggap bahwa Umat Islam yang berangkat haji memiliki potensi untuk memberontak sehingga mereka selalu dimata-matai. Akhirnya perang pun terjadi karena Umat Islam fanatik tidak bisa menerima perlakuan Bangsa Belanda. Bahkan ulama pun ikut berperang melawan Belanda. Setelah itu, gerak-gerik ulama pun diperhatikan oleh Bangsa Belanda. Bahkan ulama menganggap bahwa bangsa pribumi yang berlandung di bawah kekuasaan Belanda adalah kafir dan harus disyahadatkan kembali.

Hal tersebut terjadi akibat dari saling kecurigaan antara kaum pribumi dengan Bangsa Belanda sebagai bangsa asing yang menjajah Nusantara dan mempekerjakan bangsa pribumi dengan paksa dan upah yang sedikit. Dengan melihat perlakuan Bangsa Belanda terhadap bangsa pribumi tentu sudah jelas hubungan mereka tidak harmonis. Sejumlah peperangan terjadi karena bangsa pribumi memberontak atas perlakuan yang mereka terima.

Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam Indonesia

Pada umumnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dikategorikan sebagai kerajaan maritim. Hal ini karena pusat-pusat kekuasaannya banyak berlokasi di kota-kota pelabuhan. Kota pelabuhan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi kesultanan, sebab selain sebagai pusat pemerintahan, wilayah ini juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pasar.

Pasar merupakan salah satu sumber utama penghasilan bagi sultan atau penguasa setempat. Seluruh aktivitas transaksi berada di bawah otoritas sultan, meskipun dalam

praktiknya kewenangan tersebut didelegasikan kepada pejabat pelabuhan seperti syahbandar atau pejabat lain yang ditunjuk. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap aktivitas perdagangan, sultan memiliki hak untuk memungut berbagai pajak dan cukai atas barang-barang yang diperdagangkan.

Di pelabuhan Malaka, misalnya, terdapat kapal-kapal yang menjadi milik penuh sultan. Kegiatan perdagangan dijalankan oleh saudagar yang bertindak atas nama sultan. Setiap kapal yang berlayar dari Malaka membawa sebagian barang dagangan milik sultan, sehingga keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut sangat besar. Selain itu, sultan juga memperoleh prioritas dalam pembagian ruang penyimpanan barang dagangan di kapal. Melalui aktivitas perdagangan dan pemungutan bea cukai atas barang impor serta pajak lainnya, para sultan mampu mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Semakin ramai kapal dan saudagar yang datang ke bandar, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Beberapa sultan bahkan dikenal memiliki kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, termasuk emas dan berbagai batu mulia.

Kondisi perdagangan yang maju juga terlihat di kota-kota pelabuhan lain seperti Banten. Di kota ini terdapat beberapa pasar dengan fungsi yang berbeda-beda. Pasar Karangantu, yang terletak dekat pelabuhan, menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai bangsa, seperti Portugis, Arab, Turki, Cina, India, hingga pedagang dari berbagai daerah Nusantara. Pasar Paseban berfungsi sebagai pasar kebutuhan sehari-hari dan ramai sepanjang hari, sementara Pasar Pacinan bersifat temporer dan tidak setiap hari beroperasi.

Di Banda Aceh pada abad ke-17, kegiatan ekonomi juga berlangsung sangat aktif. Terdapat beberapa pasar yang menjadi tempat transaksi berbagai macam barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang dari beragam latar belakang bangsa. Barang-barang yang diperjualbelikan mencakup hasil produksi dalam negeri maupun barang impor, bahkan hingga komoditas yang unik seperti telur penyu.

Pasar tidak hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi juga tersebar di wilayah pedesaan. Keberadaan pasar di kota pusat kerajaan maupun di daerah lain sangat berkaitan dengan corak kehidupan ekonomi masyarakatnya. Kota-kota pusat kesultanan dan pelabuhan seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Banten, Gresik, Surabaya, Ternate, Banda, Gowa-Makassar, Banjarmasin, dan Palembang menjadi tujuan para pedagang, baik dari dalam negeri maupun dari berbagai wilayah asing. Hingga awal abad ke-17, di sejumlah wilayah Nusantara masih dijumpai sistem barter, terutama dalam transaksi antara pedagang pesisir dengan pedagang pedalaman, serta antara pedagang kota dengan petani. Namun demikian, sejak abad ke-15 dan ke-16, beberapa kerajaan Islam telah menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran, baik mata uang lokal maupun mata uang asing. Penggunaan uang ini semakin meluas seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam.

Hubungan ekonomi antara kota dan desa juga bersifat saling bergantung. Para petani menjual surplus hasil buminya kepada para pedagang, sementara pasar menjadi tempat pertukaran berbagai kebutuhan hidup. Dengan demikian, pasar memiliki peran sentral dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, pedagang-pedagang Eropa mulai meramaikan pasar-pasar di pelabuhan Nusantara. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang, kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Kedatangan Inggris dan Belanda tidak hanya membawa organisasi niaga seperti EIC dan VOC, tetapi juga disertai upaya sistematis untuk melemahkan penguasaan pasar oleh umat Islam, baik dalam perdagangan maritim maupun perdagangan darat. Kolonialisme Barat berusaha mematahkan potensi ekonomi umat Islam dengan cara menghilangkan kesadaran niaga dan

kewirausahaan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menyebarkan ajaran keagamaan yang menekankan ibadah ritual semata dan menjauhkan umat Islam dari aktivitas pasar. Dampaknya, secara perlahan budaya niaga dan semangat penguasaan ekonomi di kalangan pribumi Islam melemah.

Akibat kebijakan kolonial tersebut, terjadi kekosongan penguasaan pasar yang kemudian diisi oleh kelompok Bangsa Timur Asing seperti Cina, India, dan Arab. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan diskriminatif berbasis ras, di mana kelompok Bangsa Timur Asing ditempatkan sebagai warga kelas dua dengan berbagai hak monopoli ekonomi. Sebaliknya, pribumi Muslim diposisikan sebagai warga kelas tiga, kehilangan pasar dan kekuatan ekonominya, sehingga mengalami kemunduran yang signifikan. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan perlawanan dari para pedagang pribumi yang merasa dirugikan secara langsung oleh kebijakan ekonomi kolonial, khususnya yang dijalankan melalui VOC.

Dinamika Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda mengalami dinamika yang kompleks. Kehadiran sistem pendidikan kolonial mendorong umat Islam untuk merespons melalui berbagai bentuk penyesuaian, perlawanan, dan pembaruan pendidikan guna mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah tekanan kolonial. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda menjanjikan peluang kerja yang cukup signifikan bagi para alumninya, dan banyak pula umat Islam yang berbondong-bondong mengikuti pendidikan tersebut, kehadiran institusi ini justru menimbulkan keresahan di kalangan ulama. Keresahan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa lulusan sekolah-sekolah Belanda akan melahirkan kaum terpelajar pribumi yang bersifat sekuler, menjadi penganut serta pembela kebudayaan Barat, dan jauh dari pengetahuan serta pengamalan ajaran Islam. Salah satu adagium yang sering disuarakan pada masa itu adalah: “Barang siapa mengarahkan anaknya ke sekolah yang didirikan Belanda, maka anak itu akan menjadi kafir.”

Berangkat dari kondisi tersebut, muncullah berbagai lembaga pendidikan Islam yang digagas dan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam. Salah satunya adalah Jamiat Khair, yang didirikan di Jakarta pada 17 Juli 1905. Organisasi ini mendirikan sekolah dasar yang tidak hanya mengajarkan mata pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum seperti berhitung, sejarah, dan ilmu bumi. Kurikulum dikelola secara modern dengan sistem kelas. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa daerah setempat. Menariknya, bahasa Belanda tidak diajarkan, melainkan bahasa Inggris sebagai penggantinya. Selanjutnya, berdiri pula organisasi al-Irsyad dengan nama lengkap Jami'ah al-Ishlah wa al-Irsyad al-'Arabiyyah. Model pendidikan yang dikembangkan organisasi ini mengadopsi sistem pendidikan Timur Tengah, khususnya Mesir dan Tunisia. Hal tersebut tampak dari latar belakang para guru serta sarana pendidikan yang sebagian besar didatangkan dari kawasan Timur Tengah.

Di Majalengka, Jawa Barat, pada tahun 1911 muncul Persyarikatan Ulama yang dipelopori oleh Haji Abdul Halim. Pada awalnya, organisasi ini menyelenggarakan pendidikan bagi orang dewasa dengan jumlah peserta sekitar 60 orang, dengan materi utama Fikih dan Hadis. Setahun kemudian, pendidikan ini mengalami perkembangan dengan didirikannya pesantren yang menerapkan sistem madrasah (sistem kelas) yang terdiri dari lima tingkat. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Arab. Pada tahun 1932, Persyarikatan Ulama mendirikan Santri Asrama yang terdiri atas tiga jenjang, yaitu tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Keunikan lembaga ini terletak pada integrasi pendidikan agama, pendidikan umum, serta pembekalan keterampilan praktis, seperti pertanian dan pengolahan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari.

Setelah itu, lahirlah Muhammadiyah yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan dan didirikan pada 18 November 1912. Pada 29 Desember 1912, KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pengakuan tersebut baru diberikan pada 22 Agustus 1914 melalui Surat Ketetapan Pemerintah No. 81/1914, dan pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah Yogyakarta.

Gerakan pendidikan Muhammadiyah dimulai dengan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 1912. KH. Ahmad Dahlan menggunakan rumahnya sebagai tempat mengajar anak-anak Kauman dengan sistem sekolah modern. Pada awal pendirian, jumlah siswa hanya sembilan orang, namun dalam waktu enam bulan meningkat menjadi dua puluh orang. Pada tahun 1917, sekolah ini menjadi tempat bersejarah karena digunakan sebagai lokasi Kongres Budi Utomo. Selanjutnya, pada 17 Juni 1920 dibentuk pengurus Muhammadiyah bagian sekolah dengan HM. Hisyam sebagai ketua. KH. Ahmad Dahlan juga pernah mengajar agama Islam di Kweekschool (sekolah guru) di Jetis, Yogyakarta. Metode pengajaran yang digunakan antara lain metode induktif, ilmiah, naqliyah, serta tanya jawab, yang dilaksanakan di luar jam belajar resmi sekolah. Meskipun Muhammadiyah telah memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah kolonial Belanda, hal tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah kolonial bersikap simpatik. Gerakan Muhammadiyah justru dicurigai dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Oleh karena itu, pemerintah Belanda bersikap hati-hati terhadap organisasi ini. Pemberian subsidi tidak membuat Muhammadiyah tunduk sepenuhnya, terbukti dengan sikap tegas Muhammadiyah dalam menentang Wilde School Ordonantie (Undang-Undang Larangan Sekolah Liar).

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah menerapkan sistem pendidikan Islam modern. Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sekolah-sekolah umum yang dikelola antara lain Sekolah Kelas Dua, Schakel School, HIS, MULO, AMS, dan Hollands Inlands Kweekschool (HIK), yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama. Pada tahun 1925, Muhammadiyah telah memiliki satu sekolah guru di Yogyakarta, 14 madrasah, 32 sekolah dasar lima tahun, dan delapan HIS, dengan jumlah siswa mencapai sekitar 4.000 orang dan guru sebanyak 119 orang. Pada tahun 1935, Muhammadiyah tercatat telah mendirikan 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum, serta 1.774 lembaga pendidikan Islam.

Walaupun tetap mengajarkan agama Islam, Muhammadiyah melakukan reformasi dalam pengajaran agama, antara lain dengan memasukkan pelajaran agama Islam ke sekolah-sekolah Belanda serta mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang berbeda dari sistem pesantren tradisional.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 dengan dukungan kuat dari para ulama pesantren, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dukungan tersebut diwujudkan dalam kebijakan NU untuk mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional.

Menurut Nurcholish Madjid, pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia, yakni institusi pendidikan keagamaan tradisional yang bersifat unik dan indigenous. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan bagian integral dari sejarah peradaban Islam di Nusantara. Abdurrahman Wahid memandang sistem pendidikan pesantren memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan akademi militer, yang menekankan pengalaman belajar secara integral. Dibandingkan dengan sekolah umum yang bersifat parsial, pesantren memiliki kultur dan subkultur tersendiri dalam masyarakat. Pesantren digolongkan sebagai subkultur karena memiliki tiga elemen utama. Pertama, pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak

terkooptasi oleh kekuasaan. Secara historis, hubungan pesantren dengan kekuasaan kolonial bersifat perifer. Kedua, penggunaan kitab-kitab klasik dari berbagai abad sebagai rujukan utama. Ketiga, sistem nilai yang dianut merupakan bagian dari budaya masyarakat lokal.

Tradisionalisme pesantren menampilkan dua wajah. Di satu sisi, tradisionalisme berakar pada aspek keagamaan Islam, yang terbentuk dari perpaduan teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan ajaran tasawuf. Islam kemudian berakulturasi dengan adat dan kebiasaan lokal, sehingga melahirkan corak keislaman khas Indonesia. Di sisi lain, tradisionalisme juga tampak dalam metodologi pengajaran yang masih bersifat klasik dan monologis, seperti sistem bandongan, sorogan, dan pasaran. Meskipun demikian, tradisionalisme pesantren tidak selalu bernilai negatif. Prinsip al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah menjadi landasan penting, yakni mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Oleh karena itu, tradisionalisme pesantren perlu disinergikan dengan modernitas, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pembaruan ini pertama kali dilakukan oleh Muhammad Ilyas, yang pernah mengenyam pendidikan di HIS. Ia memperkenalkan pelajaran umum seperti membaca, menulis huruf Latin, bahasa Melayu, sejarah, dan ilmu bumi, serta metode klasikal dengan sistem kelas di lingkungan pesantren. Ia juga membuka akses terhadap surat kabar dan memperkenalkan bahasa Belanda. Meskipun awalnya mendapat penolakan dari sebagian orang tua santri, pembaruan yang dilakukan di Pesantren Tebuireng ini menjadi embrio lahirnya citra baru pesantren yang lebih maju dan kreatif, khususnya di wilayah Madura dan Jawa.

4. KESIMPULAN

Pada masa kolonial Belanda, umat Islam Indonesia menghadapi tekanan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Hubungan yang timpang antara umat Islam dan pemerintah kolonial melahirkan kebijakan-kebijakan yang membatasi peran Islam dalam ruang publik. Kondisi sosial ekonomi umat Islam yang umumnya berada pada lapisan bawah masyarakat semakin memperkuat kebutuhan akan kebangkitan dan pembaruan. Dalam konteks inilah lahir organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memainkan peran penting dalam merespons kolonialisme melalui gerakan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dinamika pembaruan pendidikan Islam menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan identitas keislaman sekaligus membangun kesadaran sosial dan kebangsaan di tengah dominasi kolonial.

5. REFERENSI

- Abdullah Hanif & Amin Haedari (ed.). 2004. *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Kompleksitas Global*. TP: IRD Press.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.
- Benda, Harry J. 1989. "Islam di Asia Tenggara dalam Abad ke-20." Dalam Azyumardi Azra (peny.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bruinessen, Martin van. 1997. *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntjaraningrat. 1982. "Ihtisar Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Perubahan Orientasi Nilai Budaya Indonesia." Dalam Kuntjaraningrat (ed.), *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Mansur. 2004. *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, Kacung. 1992. *Qua Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah*. Jakarta: Erlangga.
- Muhaimin. 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Nuansa.
- Mukti Ali. 1999. "Pengembangan Metode Memahami Islam." Dalam Zainuddin Fanani & M. Thoyyibi (peny.), *Studi Islam Asia Tenggara*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Nata, Abuddin. 2007. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1941*. Jakarta: LP3ES.
- Putuhena, M. Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Saidi, Ridwan. 1984. *Pemuda Islam dan Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. Jakarta: Rajawali.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suara Muhammadiyah. 2006. No. 10, Tahun ke-91, 16-31 Mei, hlm. 4.
- Suminto, Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Wahid, Abdurrahman. t.t. "Pondok Pesantren Masa Depan." Dalam *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Wirjosukarto, Amir Hamzah. 1985. *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*. Jember: Muria Offset.
- Yakub, H. Ismail. 1980. "Gambaran Pendidikan Aceh Sesudah Perang Aceh-Belanda Sampai Sekarang." Dalam Ismail Sunny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Yatim, Badri, dkk. 2000. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Zuhairini, dkk. 1994. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.